

EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA DAN STRATEGI BARU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Oleh :

Natalia Artha Malau, SE, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi kerakyatan sebagai paradigma dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari sistem ekonomi di Indonesia.

Kata kunci : *ekonomi kerakyatan, paradigma, strategi dan pembangunan ekonomi*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka, negara Republik Indonesia mempunyai nilai dasar sebagai asas fundamental serta sumber motivasi dan cita-cita nasional. Nilai fundamental ini adalah pandangan hidup bangsa dan filsafat negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian nilai tersebut yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila pada hakekatnya menjamin kesatuan bangsa, kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Pancasila juga mengakui dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan dalam mencapai tujuan

nasional negara Republik Indonesia. Tujuan nasional ini kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu, Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau lebih jelasnya adalah sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Salah satunya adalah Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Nasional yang memang menjadi

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia.

Pengembangan ini tidak hanya melalui sebuah rancangan saja, tetapi juga melewati pemikiran yang serius dan matang agar sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi kerakyatan sebagai paradigma dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*).

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Paradigma Pembangunan

Kata paradigma berasal dari Inggris yakni pada abad pertengahan yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yang berarti suatu model atau pola. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paradigma (*paradeiknunai*) yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau memperlihatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revoulution*.

Menurut pendapatnya, paradigma tidak lain merupakan asumsi-asumsi teoritis atau sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan,

tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Kata pembangunan yang dalam bahasa Inggris disebut *development* menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang.

Secara sederhana, pengertian pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan dengan tata nilai yang lebih baik atau lebih maju. Intinya, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan tujuan hidup.

2.2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Pancasila harus dipahami sebagai kesatuan organis, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan mambatasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai: (1) Cita-cita bangsa Indonesia, (2) Jiwa bangsa, (3) Moral Pembangunan, dan (4) Dasar negara Republik Indonesia.

2.3. Penerapan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi

demokrasi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan juga ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi juga harus mendasarkan pada kemanusiaan dan menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli serta penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila jelas berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

2.4. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya, kegiatan ini disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan dasar. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berorientasi pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

a. Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan

Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan

dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut :

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

b. Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan dan Peran Negara

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) Mengembangkan koperasi, (2) Mengembangkan BUMN, (3) Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Memenuhi hak

setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan (5) Memelihara fakir miskin serta anak terlantar.

c. Pilar-pilar Ekonomi Kerakyatan

Berikut adalah beberapa pilar demokratisasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, yaitu:

1. Peranan vital negara (pemerintah). Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian saja, tetapi juga turut menjamin kemakmuran masyarakat dan mencegah terjadinya penindasan masyarakat oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar.
3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar dan atau koperasi. Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
5. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Karakter utama

ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia.

d. Keunggulan dan Kelemahan Ekonomi Kerakyatan

Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah: (1) terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, (3) memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya.

Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

3. Pembahasan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pancasila merupakan paradigma atau acuan dalam pembangunan nasional, baik dalam bidang politik, sosial budaya maupun ekonomi. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah, “Prinsip Ekonomi seperti apakah yang sesuai untuk Indonesia?”

Negara sedang berkembang (developing contry) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu / pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945. Lalu, “Mengapa kita sebaiknya menerapkan Ekonomi

Kerakyatan ini?”. Negara Indonesia saat ini didominasi oleh rakyat yang hampir separuhnya dalam kondisi miskin seperti yang diungkapkan World Bank, yaitu jumlah rakyat miskin di Indonesia sebesar 115 juta orang pada tahun 2008. Jumlah ini sangat banyak dan berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut tentu saja memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Jika pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal, maka akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup dan justru akan memperbesar jumlah masyarakat miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, maka akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak. Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Selain itu, pemerintahan yang menerapkan prinsip ini juga memerlukan sosok Pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak.

Empat alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia.

a. Karakteristik Indonesia

Konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Indonesia harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif.

b. Tuntutan Konstitusi

Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi kita adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 diinterpretasikan sebagai bentuk koperasi,

tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

c. Fakta Empirik

Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Namun itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja. Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami guncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan terjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

d. Kegagalan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama 32 tahun lebih, dilihat dari satu aspek memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Walaupun dalam periode tersebut, kita menghadapi 2 kali krisis ekonomi (yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak), tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih di atas 7 persen pertahun. Volume dan nilai eksport minyak dan non migas juga meningkat tajam. Namun pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin makin meningkat,

kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar daerah makin lebar, jumlah dan ratio hutang dengan GDP juga meningkat tajam, dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat. Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah kita dilaksanakan, program 8 jalur pemerataan telah kita canangkan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya bukan program penanggulangan kemiskinan, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai: (1) perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 1), (2) perwujudan konsep Trisakti (berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan), (3) perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara (pasal 33 ayat 2), dan (4) perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2). Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah untuk:

a. Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan

- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

4. Penutup

Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari sistem ekonomi di Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara sedang

berkembang (developing contry) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu/pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.

Wikipedia. 2014. Ekonomi Pancasila (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Pancasila) Diakses pada 08 Desember 2014 Pukul 20.40.

Daftar Pustaka

Bahiyah, F. 2011. Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Nasional (<http://faridahbahiyah.wordpress.com/2011/07/21/pancasila-sebagai-paradigma-dalam-pembangunan-nasional/>) diakses pada 08 Desember 2015 Pukul 20.00.

Calam, Ahmad dan Sobirin. 2008. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. LPPM STMIK TRIGUNA DHARMA. Volume 4, No. 1.

Hutomo, M.Y. 2001. Konsep Ekonomi Kerakyatan. Majalah PP Edisi 25.

Rukiyati, dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press.

Rochimudin. 2013. Pancasila sebagai Paradigma pembangunan (<http://belajarnegara.blogspot.com/2013/04/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html>) Diakses pada 08 Desember 2015 Pukul 21.00.

Soegito, AT dkk. 2013. Pendidikan Pancasila. Semarang : Unnes Press.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.